

ABSTRAK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi disusun sebagai landasan hukum dalam mewujudkan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang tertib, aman, efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan rencana tata ruang serta kepentingan publik. Pemerataan akses infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan salah satu prasyarat dalam mendukung percepatan transformasi digital serta pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan komunikasi dan informasi secara efektif dan efisien. Di sisi lain, perkembangan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan pembangunan jaringan menuntut adanya pengaturan yang lebih komprehensif terhadap menara telekomunikasi, tiang microcell, fiber optik, dan infrastruktur pasif lainnya. Rancangan Peraturan Daerah ini sekaligus diperlukan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemajuan teknologi.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah meliputi penataan, perizinan, dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi; penetapan lokasi sesuai rencana tata ruang dan kebutuhan jaringan; penggunaan bersama infrastruktur; pengelolaan infrastruktur pasif; standar teknis dan kualitas layanan; fasilitasi oleh Pemerintah Daerah; serta pengenaan sanksi administratif. Setiap pembangunan infrastruktur pasif diwajibkan memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku, sedangkan penataan lokasinya mempertimbangkan tata ruang, ketersediaan lahan, kebutuhan jaringan, kepadatan penggunaan jasa telekomunikasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, pengaturan diarahkan untuk mendukung pemerataan jaringan, termasuk di wilayah perbukitan, pegunungan, pedalaman, dan daerah dengan biaya pembangunan tinggi. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kata Kunci: infrastruktur pasif telekomunikasi; penataan; pengendalian; perizinan; pemerataan akses telekomunikasi; Kabupaten Kebumen.

The Draft Regional Regulation of Kebumen Regency on the Arrangement and Control of Passive Telecommunications Infrastructure is formulated as a legal framework to ensure the orderly, safe, efficient, sustainable, and spatially integrated development and control of passive telecommunications infrastructure in accordance with spatial planning and public interests. Equitable access to passive telecommunications infrastructure is an essential prerequisite for accelerating digital transformation and fulfilling the public's right to access communication and information services effectively and efficiently. At the same time, technological developments and the increasing demand for network infrastructure require a

more comprehensive regulatory framework governing telecommunications towers, microcell poles, fiber optic networks, and other passive infrastructure. This Draft Regional Regulation is also intended to replace Regional Regulation of Kebumen Regency Number 27 of 2012 concerning the Arrangement and Control of Telecommunications Towers and Fiber Optics, which is considered no longer compatible with developments in legislation and telecommunications technology.

The Draft Regional Regulation governs the arrangement, licensing, and control of passive telecommunications infrastructure; location determination in accordance with spatial plans and network requirements; shared use of infrastructure; management of passive infrastructure; technical standards and service quality; facilitation by the Regional Government; and administrative sanctions. The construction of passive telecommunications infrastructure is required to comply with applicable licensing requirements and technical standards, while location planning takes into account spatial plans, land availability, network requirements, telecommunications service demand, and technological developments. The regulation also seeks to promote equitable telecommunications coverage, including in hilly, mountainous, remote, and other areas where infrastructure development involves high costs. Upon the enactment of this Regional Regulation, Regional Regulation of Kebumen Regency Number 27 of 2012 is revoked and declared no longer valid.

Keywords: passive telecommunications infrastructure; arrangement; control; licensing; equitable telecommunications access; Kebumen Regency.